EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)
Volume XX, Nomor 2, Oktober 2026 hal. 170-182
ISSN: 1978-1180 (Printed) ISSN : 3046-7977 (Electronic)
Open Access: https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/index

Pengalaman Auditor Menghadapi Risiko Fraud Siklus Akuisisi-Pembayaran Ditinjau dari Relasi Auditor-Auditee: Fenomenologi di Makassar

*Theresia Aurelia Seroja[1], Gita Angelica Kie[2], Siti Rahma Aulia[3], Alia Rezki Amalia[4]
[1234] Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar
*corresponding email: theresiaseroja@gmail.com

ARTICLE INFO
Article Received
2 Oktober 2026
Article Revised
13 Oktober 2026
Article Accepted
30 Oktober 2026

Keywords
Fraud Risk; Acquisition and Payment Cycle; Auditor-Auditee Relationship; Phenomenological Study

DOI:
10.61179/ejba.v20i2.870

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana auditor mengalami dan menghadapi risiko fraud pada siklus akuisisi-pembayaran dalam konteks relasi auditor-auditee di Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur terhadap dua auditor dari Kantor Akuntan Publik yang berbeda, yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman dalam mengaudit siklus akuisisi-pembayaran dan berinteraksi dengan auditee. Data wawancara dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan informasi berdasarkan tema yang relevan, perbandingan pengalaman informan, identifikasi pola yang muncul, serta interpretasi temuan dengan mengaitkannya pada literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko fraud tidak dapat diidentifikasi hanya melalui dokumen transaksi. Auditor mengombinasikan pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik, vouching, skeptisisme profesional, pemahaman proses bisnis, dan komunikasi interpersonal untuk menilai keterjadian, keakuratan, dan kelengkapan transaksi. Relasi auditor-auditee mempermudah akses informasi dan klarifikasi, tetapi kedekatan berlebihan, tekanan, atau konflik kepentingan dapat mengancam independensi auditor. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan komunikasi relasional dengan tetap mempertahankan batas profesional, skeptisisme, dan independensi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif pengalaman mengenai peran paradoksal relasi auditor-auditee dalam mengidentifikasi risiko fraud pada siklus akuisisi-pembayaran, khususnya berdasarkan pengalaman auditor di Makassar

ABSTRACT
This study aims to analyze how auditors experience and respond to fraud risks in the acquisition-payment cycle within auditor-auditee relationships in Makassar. A qualitative approach was employed through semi-structured interviews with two auditors from different Public Accounting Firms, selected purposively based on their experience in auditing the acquisition-payment cycle and interacting with auditees. The interview data were analyzed descriptively by grouping information into relevant themes, comparing the experiences of the informants, identifying emerging patterns, and interpreting the findings in relation to relevant literature. The findings indicate that fraud risks cannot be identified solely through transaction documents. Auditors combine document examination, physical verification, vouching, professional skepticism, business-process understanding, and interpersonal communication to assess the occurrence, accuracy, and completeness of transactions. The auditor-auditee relationship facilitates access to information and clarification, but excessive closeness, pressure, or conflicts of interest may threaten auditor independence. These findings imply the need to strengthen relational communication while maintaining professional boundaries, skepticism, and independence. The novelty of this study lies in its experiential perspective on the paradoxical role of auditor-auditee relationships in identifying fraud risks within the acquisition-payment cycle, particularly based on auditors' experiences in Makassar.

PENDAHULUAN

Audit independen pada dasarnya diperlukan untuk memberikan nilai verifikasi yang objektif terhadap informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Independensi menjadi pembeda utama antara audit eksternal dan penyusunan laporan keuangan internal, karena tanpa independensi, proses audit kehilangan

© 2026 Theresia Aurelia Seroja, Gita Angelica Kie, Siti Rahma Aulia, Alia Rezki Amalia

fungsi pembeda tersebut (Kaplan, 2004). Posisi auditor sebagai pihak yang berada di luar proses penyusunan laporan keuangan membuat auditor dituntut untuk memberikan penilaian yang objektif, termasuk ketika berhadapan dengan kemungkinan adanya kecurangan dalam aktivitas perusahaan, Semakin berpengalaman seorang auditor, semakin luas kemampuannya untuk menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit, yang secara langsung meningkatkan kemampuannya mendeteksi kecurangan (Juliyanti & Muslim, 2024).

Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai bagian kegiatan operasional, terutama pada siklus pengadaan barang/pembayaran yang merupakan area paling rentan terhadap eksploitasi kecurangan. Bentuk kecurangan juga tidak selalu mudah terlihat melalui dokumen transaksi, sebab manipulasi entri jurnal secara langsung pada buku besar menjadi salah satu bentuk penipuan laporan keuangan yang paling sulit diidentifikasi (Wati, 2026). Situasi ini menempatkan auditor pada kondisi yang menuntut lebih dari sekadar kemampuan memeriksa kesesuaian angka dan dokumen. Auditor perlu memahami pola transaksi, mencermati indikasi yang tidak wajar, serta menentukan bagaimana suatu risiko perlu ditindaklanjuti.

Tuntutan tersebut semakin relevan ketika auditor berhadapan dengan data transaksi dalam jumlah besar. Pemahaman terhadap standar akuntansi formal perlu berjalan bersama kemampuan analisis data agar auditor mampu mengenali pola-pola kecurangan yang mungkin tidak terlihat melalui pemeriksaan secara konvensional (Wati, 2026). Proses mengenali dan merespons risiko tersebut pada praktiknya juga tidak berlangsung secara sepihak, karena auditor membutuhkan informasi, penjelasan, dan akses terhadap pihak auditee selama proses pemeriksaan.

Kebutuhan akan informasi tersebut membuat hubungan antara auditor dan auditee menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman audit. Relasi tersebut tidak selalu terbatas pada hubungan profesional yang bersifat formal. Di Indonesia, relasi auditor-auditee cenderung dipahami sebagai hubungan kesetaraan (peers' relationship) yang memadukan dimensi profesional, ikatan personal, dan kepercayaan, bahkan hubungan personal sering kali perlu dibangun terlebih dahulu agar interaksi bisnis dapat berjalan efektif (Dunakhir et al., 2023). Pada titik inilah auditor dapat menghadapi situasi yang kompleks: tetap membangun hubungan yang memungkinkan proses audit berjalan efektif, sekaligus mempertahankan independensi ketika menemukan atau menilai adanya risiko fraud.

Kompleksitas pengalaman tersebut menjadi penting untuk dipahami secara lebih mendalam, khususnya dalam siklus akuisisi-pembayaran yang memiliki kerentanan terhadap fraud. Penelitian ini karena itu berfokus pada bagaimana auditor mengalami, memaknai, dan menghadapi risiko fraud dalam siklus akuisisi-pembayaran ketika proses tersebut berlangsung dalam relasi auditor-auditee. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman tersebut secara langsung dari perspektif auditor di Makassar.

KAJIAN LITERASI

Audit

Auditing merupakan pemeriksaan sistematis atas bukti untuk menilai kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan oleh auditor yang kompeten dan independen (Arens et al, 2015). Artinya, audit tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai kriteria yang ditetapkan. Dari perspektif Teori Efektivitas Organisasi, efektivitas suatu unit audit ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan organisasi, sumber daya, dan proses internal. Dalam konteks ini, kapasitas auditor dan waktu kerja yang terbatas menyebabkan

organisasi tidak mampu menjalankan seluruh tahapan audit secara optimal (Parinding et al, 2025). Pada siklus akuisisi-pembayaran, audit internal dilakukan melalui pengujian kepatuhan terhadap SOP, verifikasi keabsahan dokumen pengadaan secara berkala, serta pemeriksaan langsung kepada penyedia barang/jasa guna mendeteksi dan menekan peluang terjadinya kecurangan (Fransiska, 2015).

Fraud

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja melalui penipuan atau manipulasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dengan demikian, fraud tidak sekadar merupakan kesalahan, tetapi tindakan yang mengandung unsur kesengajaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks internal perusahaan, tindakan tersebut dapat dipicu oleh kondisi personil, seperti tekanan ekonomi, preferensi sikap individu, dinamika lingkungan kerja, serta minimnya pemahaman teknis terhadap standar akuntansi (Witanto & Sumaryanto, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko fraud tidak hanya berkaitan dengan kelemahan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia yang perlu diperhatikan dalam proses audit.

Menurut Wahyudi & Qintharah (2023) melakukan pendeteksian kecurangan perlu dilakukan dengan penilaian risiko terlebih dahulu. Pada siklus pengeluaran, pengawasan yang ketat, termasuk otorisasi berlapis, pemisahan fungsi, dan continuous monitoring, memungkinkan deteksi dini terhadap duplikasi pembayaran, faktur fiktif, dan transaksi tidak sah sehingga kerugian organisasi dapat ditekan. Penerapan audit berbasis risiko memberikan prioritas pada area dengan potensi risiko tinggi, sehingga sumber daya auditor dapat dialokasikan secara efisien dan fokus pada transaksi yang membutuhkan perhatian lebih (Taufikurahman et al, 2025).

Kecurangan pada Siklus Pembayaran dan Akuisisi

Kecurangan pada siklus akuisisi dan pembayaran dapat dikenali melalui penyimpangan dalam transaksi maupun ketidakwajaran pada akun terkait. Salah satu indikasinya berupa anomali akun, seperti lonjakan beban penyusutan peralatan yang tidak sejalan dengan pertambahan atau akuisisi fisik aset tetap pada periode berjalan (Witanto & Sumaryanto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara catatan akuntansi dan kondisi transaksi dapat menjadi sinyal awal bagi auditor dalam menelusuri risiko fraud. Pada pengadaan tunai, kecurangan juga dapat muncul melalui penggelembungan nilai nota belanja serta penetapan harga buatan yang dihasilkan dari kolusi dengan vendor (Katan & Ratih, 2023).

Menurut pendapat Tumanan et al, (2025) Analisis terhadap kasus siklus akuisisi dan pembayaran menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas pengendalian internal dapat diterapkan dalam praktik. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur pengendalian, serta merumuskan perbaikan yang relevan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Disamping itu, Selain prosedur audit, efektivitas pengendalian internal perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko audit. Penerapan pengendalian internal yang baik melalui otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dokumentasi yang memadai, sistem informasi yang akurat, serta pemantauan secara berkala dapat membantu perusahaan mencegah terjadinya kesalahan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan (Putri et al, 2026).

Relasi Auditor-Auditee

Relasi auditor-auditee menjadi bagian penting dalam proses audit karena kualitas interaksi dapat memengaruhi bagaimana informasi diperoleh dan risiko diidentifikasi. Dalam mengomunikasikan indikasi kecurangan kepada manajemen auditee, auditor cenderung menggunakan pendekatan interpersonal yang persuasif, persuasif-akrab, dan komunikatif daripada bersikap konfrontatif untuk membangun interaksi yang efektif (Witanto & Sumaryanto, 2024). Artinya, cara auditor membangun relasi dapat menentukan keterbukaan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Pengalaman dan keahlian relasional auditor dalam membangun pendekatan interpersonal juga dapat mendorong keterbukaan serta kejujuran auditee, sehingga mempermudah auditor memperoleh informasi penting dalam mengidentifikasi risiko (Safae, 2026).

Menurut Miradji et al (2025), Dilema etis auditor sering muncul dari ikatan ekonomi dan relasi jangka panjang dengan klien. Ketika fee audit atau ketergantungan pendapatan terhadap klien menjadi besar, independensi berisiko tergerus karena auditor berada dalam situasi yang "tidak nyaman" untuk bersikap tegas. Pada titik inilah, mekanisme "penjagaan" etika menjadi sangat penting. Kerangka konseptual dalam kode etik (baik internasional maupun di Indonesia) mengarahkan auditor untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar (misalnya ancaman kepentingan pribadi, *self-review*, advokasi, familiaritas, dan intimidasi) dengan menerapkan pencegahan (*safeguards*) yang memadai, atau menolak menghentikan perikatan jika ancaman tidak dapat diturunkan ke level yang dapat diterima. Maka dari itu untuk mendukung pendapat mengenai dilema etis auditor yang sering muncul, Mahendra et al (2026) mengungkapkan bahwa proses audit yang efektif ditandai dengan perencanaan audit yang tepat, pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang sesuai standar, serta penyusunan laporan audit yang akurat dan andal. Efektivitas audit juga berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesional secara tepat, mengelola waktu dan sumber daya secara efisien, serta menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah bagi organisasi atau pihak auditee.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman auditor dalam menghadapi risiko fraud pada siklus akuisisi-pembayaran ditinjau dari relasi auditor-auditee. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan pengalaman auditor dalam melaksanakan penugasan audit, khususnya yang berkaitan dengan siklus akuisisi dan pembayaran serta interaksi dengan auditee.

Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengelompokan informasi berdasarkan tema yang relevan, membandingkan pengalaman kedua informan, mengidentifikasi pola yang muncul, dan menginterpretasikan temuan dengan mengaitkannya pada literatur yang relevan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai pengalaman auditor dalam menghadapi risiko fraud pada siklus akuisisi-pembayaran dalam konteks relasi auditor-auditee. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam proses audit adalah kurangnya keterbukaan dari pihak auditee. Hal ini dikarenakan, ketidakpastian dan ketakutan terhadap konsekuensi dalam pengungkapan informasi yang dapat

menyebabkan auditee menyembunyikan data atau fakta penting ini akan mengakibatkan auditor tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang situasi keuangan atau operasional organisasi (Rizal, 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Risiko fraud dalam siklus akuisisi dan pembayaran tidak selalu dapat diidentifikasi hanya melalui keberadaan atau ketiadaan dokumen transaksi. Siklus ini melibatkan rangkaian aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari pengadaan, pemilihan dan hubungan dengan vendor, penerimaan barang, pencatatan persediaan atau aset, hingga proses otorisasi dan pembayaran. Oleh karena itu, kemampuan auditor dalam mengidentifikasi fraud tidak hanya bergantung pada prosedur pemeriksaan yang bersifat teknis, tetapi juga pada kemampuan auditor memperoleh informasi yang cukup, memahami konteks transaksi, serta membangun komunikasi yang memungkinkan auditee memberikan informasi secara terbuka. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena auditor berhadapan dengan pihak yang pada satu sisi merupakan sumber utama informasi audit, tetapi pada sisi lain juga merupakan pihak yang kepentingannya dapat terdampak oleh temuan audit. Dengan demikian, relasi auditor–auditee dalam penugasan audit memiliki posisi yang bersifat dualistik: relasi yang baik dapat memperlancar proses pemeriksaan dan pengungkapan masalah, tetapi relasi yang disertai kedekatan kepentingan atau tekanan dapat menciptakan risiko terhadap skeptisisme profesional dan independensi auditor. Perspektif tersebut sejalan dengan Safae (2026) yang menunjukkan bahwa risiko fraud dalam penugasan audit dapat muncul melalui penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung yang sengaja dipalsukan sebagai akibat dari bad faith auditee. Dalam konteks siklus akuisisi dan pembayaran, risiko tersebut menjadi relevan karena auditor perlu membedakan antara kesalahan administratif, ketidaklengkapan dokumentasi, dan tindakan yang memang mengandung unsur manipulasi atau penyembunyian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa auditor menghadapi risiko fraud dengan menelusuri transaksi secara lebih luas daripada sekadar mencocokkan angka dalam laporan keuangan dengan dokumen pendukung. Pengalaman auditor FR dalam mengaudit entitas di bidang kesehatan menunjukkan bahwa transaksi pembelian obat, aset rumah sakit, maupun aset dan bahan habis pakai perlu ditelusuri berdasarkan keseluruhan alur transaksi, mulai dari proses pemesanan hingga barang diterima. Hal ini sejalan dengan asersi manajemen yang tertuang pada Arens (2015) Auditor tidak hanya meminta bukti transaksi, tetapi juga memastikan keberadaan dokumentasi pada saat proses pembelian dan penerimaan barang. Hal ini menunjukkan bahwa bukti audit dipandang bukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai sarana untuk membuktikan keterjadian (occurrence) dan keberadaan (existence) suatu transaksi.

Pendekatan tersebut relevan dengan Katan dan Ratih (2023) yang menyatakan bahwa pencairan pembayaran secara penuh tanpa verifikasi terhadap keberadaan barang dan kelengkapan faktur asli merupakan praktik yang rentan terhadap kecurangan dan dapat berujung pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat. Dalam konteks yang ditemukan auditor FR, kebutuhan terhadap foto atau dokumentasi barang ketika diterima merupakan bentuk konkret dari upaya menghubungkan dokumen transaksi dengan kondisi fisik. Dengan demikian, pemeriksaan tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdapat faktur, tetapi berkembang menjadi pertanyaan apakah

transaksi benar-benar terjadi, apakah barang benar-benar diterima, dan apakah barang yang diterima sesuai dengan informasi yang dicatat.

Risiko tersebut terlihat lebih jelas pada pengalaman auditor FR ketika menemukan transaksi pada salah satu rumah sakit di Maros yang hanya didukung oleh nota dan tidak memiliki bukti resmi yang memadai. Menurut FR, nota semacam itu memiliki risiko untuk dipalsukan sehingga keterjadian transaksi tidak dapat langsung diyakini hanya berdasarkan keberadaan dokumen tersebut. Auditor kemudian membutuhkan dokumentasi yang lebih lengkap pada saat pembelian maupun penerimaan barang. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan dokumen belum tentu identik dengan keandalan bukti audit. Dokumen yang secara administratif tersedia tetap perlu diuji keabsahan dan keterkaitannya dengan transaksi yang sebenarnya terjadi.

Hal tersebut semakin terlihat dalam pemeriksaan aset dan persediaan. Auditor FR menjelaskan bahwa alat kesehatan perlu didokumentasikan dan diberi penanda tahun kedatangan karena informasi tersebut berkaitan dengan masa penggunaan dan penyusutan aset. Ketika terdapat alat yang baru dibeli tetapi relatif cepat mengalami kerusakan, kondisi tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk mempertanyakan kewajaran transaksi dan penggunaan aset. Artinya, pemeriksaan fisik tidak hanya digunakan untuk memastikan bahwa aset secara fisik ada, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak wajar dalam siklus akuisisi dan pembayaran.

Temuan auditor FR mengenai persediaan juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi fisik dapat menjadi indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pada pemeriksaan di Bone, misalnya, bahan habis pakai seperti kapas dan obat harus didokumentasikan dengan jumlah yang terlihat secara jelas. Ketika ditemukan kekurangan sekitar 50 unit, auditor tidak langsung meninggalkan perbedaan tersebut, tetapi membandingkan kondisi fisik dengan kartu persediaan dan mempertanyakan mengapa jumlah yang tercatat tidak sesuai dengan bukti fisik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa red flag tidak selalu berbentuk transaksi yang secara eksplisit terlihat sebagai fraud. Ketidaksesuaian sederhana antara catatan dan kondisi fisik dapat menjadi titik awal untuk menelusuri kemungkinan kesalahan pencatatan, kehilangan, penyalahgunaan, ataupun manipulasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh auditor RA yang menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan pembelian dilakukan melalui vouching, yaitu memilih sampel transaksi dan meminta dokumen pendukung untuk membuktikan asersi yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Dalam pendekatan audit berbasis risiko, sasaran utama pemeriksaan adalah risiko itu sendiri, di mana prosedur audit berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menguji dan memitigasi potensi risiko tersebut (Purwanti et al, 2025), Pengujian tidak hanya mempertanyakan apakah transaksi terjadi, tetapi juga apakah nilai transaksi akurat serta apakah kuantitas dan harga telah dicatat secara benar. Dengan demikian, pengalaman FR dan RA memperlihatkan pola yang sama bahwa risiko dalam siklus akuisisi dan pembayaran harus diuji melalui hubungan antara dokumen, transaksi, nilai, kuantitas, dan kondisi fisik. Perbedaannya terletak pada titik pengalaman yang ditekankan: FR lebih banyak menggambarkan pentingnya verifikasi lapangan dan bukti fisik, sedangkan RA menekankan pengujian asersi melalui prosedur vouching. Kedua pengalaman tersebut saling melengkapi dan menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik bukanlah dua pendekatan yang terpisah, tetapi bagian dari proses memperoleh keyakinan

bahwa transaksi pembelian benar-benar terjadi dan dicatat secara tepat.

Pada sisi lain, RA menjelaskan bahwa perkembangan sistem informasi telah mengurangi beberapa bentuk kesalahan administratif karena faktur tidak lagi selalu dibuat secara manual dan dapat langsung terlihat dalam sistem, khususnya ketika sistem telah terintegrasi dengan vendor. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat jejak audit dan mengurangi risiko tertentu yang berasal dari manipulasi dokumen manual. Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa digitalisasi menghilangkan risiko fraud. Sistem dapat memperkuat bukti transaksi, tetapi auditor tetap perlu mempertanyakan substansi transaksi, pihak yang terlibat, otorisasi, serta kesesuaian antara catatan sistem dengan kondisi aktual. Dengan kata lain, peralihan dari dokumen manual ke sistem terintegrasi mengurangi sebagian risiko dokumenter, tetapi tidak otomatis menghilangkan risiko kolusi atau penyalahgunaan kewenangan.

Risiko fraud juga dapat muncul pada sisi yang lebih sulit dideteksi, yaitu transaksi atau kewajiban yang justru tidak tercatat. RA menekankan bahwa dalam siklus akuisisi dan pembayaran terdapat akun utang yang memiliki risiko understatement. Menurutnya, mencari utang yang sengaja atau tidak sengaja tidak dilaporkan lebih menantang dibandingkan menemukan aset atau piutang yang disajikan terlalu tinggi, karena auditor harus mencari sesuatu yang tidak terlihat dalam laporan. Hal ini menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam risiko fraud siklus akuisisi dan pembayaran: fraud tidak selalu dilakukan dengan menciptakan transaksi fiktif, tetapi juga dapat dilakukan melalui penghilangan atau penundaan pengakuan kewajiban. Oleh sebab itu, auditor perlu memiliki skeptisisme terhadap transaksi di sekitar periode pelaporan, kewajiban yang belum dicatat, serta hubungan antara penerimaan barang, invoice, dan pencatatan utang

Selain manipulasi pencatatan, pengalaman RA menunjukkan adanya kemungkinan fraud yang dilakukan oleh pegawai melalui hubungan dengan vendor. Contohnya adalah ketika perusahaan seharusnya memperoleh diskon dari vendor tetapi keuntungan tersebut tidak dinikmati perusahaan, harga pembelian menjadi lebih tinggi karena adanya kesepakatan tertentu antara pegawai dan vendor, atau pembayaran yang telah dilakukan perusahaan justru diselewengkan oleh pegawai. Modus tersebut memiliki keterkaitan dengan Wati (2026) yang mengidentifikasi pembentukan vendor fiktif, kickbacks, dan manipulasi hirarki otorisasi pembayaran sebagai modus kecurangan dalam pengeluaran dana pada siklus pembelian. Dengan demikian, risiko fraud dalam siklus ini tidak hanya berada pada kualitas dokumen, tetapi juga pada relasi antaraktor di dalam dan di luar organisasi. Hubungan antara pegawai dan vendor dapat menciptakan ruang kolusi yang tidak selalu terlihat melalui pengujian dokumen secara konvensional.

Menariknya, RA juga menjelaskan bahwa ketika fraud berkaitan dengan kerugian perusahaan akibat perilaku pegawai, auditee justru cenderung lebih bersemangat untuk menindaklanjutinya karena temuan tersebut dipandang sebagai bahan perbaikan organisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa respons auditee terhadap auditor tidak bersifat tunggal. Auditee dapat bersikap defensif terhadap temuan tertentu, tetapi dapat pula mendukung auditor apabila temuan tersebut dianggap membantu melindungi kepentingan organisasi. Dengan demikian, karakter relasi auditor–auditee berpotensi memengaruhi bagaimana temuan diterima dan ditindaklanjuti, tetapi tidak seharusnya

menentukan apakah suatu temuan diungkapkan atau tidak

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa relasi auditor–auditee memiliki fungsi penting dalam proses memperoleh informasi. Auditor FR menggambarkan bahwa KAP dalam praktiknya tidak hanya hadir untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan arahan dan rekomendasi kepada auditee. Ia menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan fisik auditor dapat mengarahkan auditee dan memberikan rekomendasi karena KAP berperan sebagai rekanan bagi auditee. Sebelum pemeriksaan BPK dilakukan, auditor juga melakukan sounding terhadap masalah yang ditemukan agar auditee memiliki kesempatan memperbaiki kekurangan yang memang dapat diperbaiki dan memberikan penjelasan apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai.

Temuan tersebut sejalan dengan Safae (2026) yang menjelaskan bahwa pengalaman dan keahlian relasional auditor dalam membangun pendekatan interpersonal dapat mendorong keterbukaan serta kejujuran auditee, sehingga mempermudah auditor memperoleh informasi penting untuk mengidentifikasi risiko. Dunakhir et al. (2023) juga menekankan bahwa keterbukaan komunikasi dan komitmen untuk saling menghormati antara auditor dan auditee menjadi faktor penting dalam membicarakan masalah audit yang sensitif tanpa secara langsung merusak hubungan profesional. Dengan demikian, relasi auditor–auditee dalam penelitian ini tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan sosial, tetapi sebagai mekanisme komunikasi yang memiliki konsekuensi terhadap kualitas informasi audit.

Namun, pengalaman FR menunjukkan bahwa membangun keterbukaan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pola komunikasi yang sama kepada seluruh auditee. Ia menemukan bahwa terdapat auditee yang tertutup, defensif, ramah, terbuka, ataupun mudah bergaul. Oleh karena itu, auditor perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi agar auditee bersedia memberikan informasi secara transparan. Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya kompetensi relasional dalam pekerjaan auditor. Auditor tidak cukup hanya menguasai prosedur pemeriksaan, tetapi juga perlu membaca karakter dan respons pihak yang diperiksa agar komunikasi mengenai temuan tidak berubah menjadi konflik interpersonal.

Akan tetapi, kemampuan membangun relasi tersebut memiliki batas yang penting. RA secara eksplisit menekankan bahwa auditor harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan. Independensi secara fakta berkaitan dengan kondisi aktual auditor dalam menjalankan penugasan secara objektif, sedangkan independensi dalam penampilan berkaitan dengan bagaimana hubungan tersebut dipersepsikan oleh pihak lain. RA memberikan contoh bahwa hubungan yang sangat dekat dengan auditee, terlebih hubungan keluarga, dapat menimbulkan persepsi bahwa hasil audit dipengaruhi hubungan tersebut meskipun auditor secara aktual merasa objektif. Pandangan ini memperlihatkan bahwa relasi yang membantu komunikasi tidak boleh berubah menjadi kedekatan yang menciptakan keraguan atas assurance yang diberikan auditor.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika auditee mulai menyampaikan permintaan terhadap hasil atau penyajian audit. RA menjelaskan bahwa permintaan klien sejauh ini masih berada pada hal-hal seperti penyajian arus kas dan temuan dalam management letter. Namun, terdapat situasi ketika klien meminta agar temuan tertentu tidak ditindaklanjuti karena laporan tersebut akan dibaca oleh komisaris. Dalam kondisi demikian, auditor mengambil jalan tengah

dengan mengakomodasi permintaan selama hal tersebut tidak memengaruhi integritas dan hasil audit. Akan tetapi, RA menegaskan bahwa permintaan tersebut menjadi masalah ketika sudah memengaruhi pertimbangan auditor atau menyebabkan temuan yang seharusnya disampaikan menjadi hilang.

Kondisi ini memperlihatkan batas antara akomodasi profesional dan kompromi terhadap objektivitas. Auditor dapat membantu auditee memperbaiki penyajian atau memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, tetapi bantuan tersebut berbeda secara substansial dari menghilangkan temuan yang seharusnya dikomunikasikan. Dalam konteks ini, relasi yang sehat bukanlah relasi tanpa konflik, melainkan relasi yang memungkinkan auditor menyampaikan temuan secara tegas sekaligus memungkinkan auditee memahami dasar temuan tersebut. Dengan kata lain, menjaga hubungan tidak berarti menghindari ketidaknyamanan dalam proses audit.

Dimensi relasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan antara auditor dan auditee. Dunakhir et al. (2023) menjelaskan bahwa karakteristik budaya dengan large power distance di Indonesia berpotensi menciptakan power conflict, yang dapat menempatkan auditor pada posisi hierarki yang kurang menguntungkan dan membuatnya lebih rentan terhadap tekanan auditee. Sementara itu, McKenna et al. (2025) menunjukkan bahwa tekanan untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan auditee dapat mendorong relaxed scrutiny, yaitu pelonggaran kecermatan pemeriksaan yang pada akhirnya berpotensi mengancam ketegasan dan independensi auditor.

Dalam pengalaman auditor FR, terdapat konteks kelembagaan yang membuat auditee relatif terbuka terhadap pemeriksaan KAP. FR menjelaskan bahwa auditee cenderung lebih terbuka dan berhati-hati karena hasil pemeriksaan KAP selanjutnya dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan BPK. Karena itu, auditee memiliki kepentingan agar kesalahan ditemukan dan diperbaiki lebih dahulu oleh KAP. Kondisi ini menciptakan dinamika yang menarik: tekanan dari pemeriksaan eksternal berikutnya justru dapat membuat hubungan auditor–auditee lebih kooperatif karena auditee melihat auditor sebagai pihak yang dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sebelum pemeriksaan berikutnya.

Namun, temuan RA menunjukkan dimensi lain dari hubungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa terjaganya relasi dengan auditee penting untuk mempertahankan loyalitas auditee karena auditee merupakan pihak yang membayar jasa audit. RA menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi independensi auditor, tetapi mengakui bahwa faktor tersebut merupakan alasan pentingnya relasi auditor–auditee. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan struktural dalam hubungan audit: auditor dituntut independen terhadap pihak yang diaudit, tetapi secara ekonomi tetap memiliki hubungan jasa dengan pihak tersebut. Karena itu, independensi tidak cukup dipahami sebagai niat subjektif auditor untuk tetap objektif, melainkan perlu dijaga melalui batas profesional dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan permintaan auditee terhadap management letter. Ketika klien meminta agar suatu temuan tidak ditindaklanjuti karena khawatir dibaca oleh komisaris, terdapat potensi konflik antara kepentingan auditee dalam menjaga citra organisasi dan kepentingan auditor dalam mengomunikasikan hasil pemeriksaan. Dalam kondisi tersebut,

keputusan auditor untuk tetap mempertahankan temuan yang material menunjukkan bahwa relasi profesional memiliki batas. Auditor masih dapat memberikan ruang bagi auditee untuk melakukan perbaikan, tetapi tidak seharusnya menjadikan hubungan bisnis sebagai dasar untuk menghilangkan informasi yang relevan dari hasil audit.

Hal tersebut memperkuat temuan penelitian memperlihatkan bahwa relasi auditor–auditee tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai faktor yang selalu memperkuat ataupun selalu mengancam kualitas audit. Dampaknya bergantung pada bagaimana relasi tersebut dikelola dan sejauh mana batas profesional tetap dipertahankan. Relasi yang cukup dekat dapat menghasilkan kepercayaan dan keterbukaan sehingga auditor lebih mudah memperoleh informasi mengenai transaksi dan risiko. Sebaliknya, apabila kedekatan tersebut berkembang menjadi tekanan, konflik kepentingan, atau ketergantungan terhadap loyalitas auditee, relasi yang sama dapat menjadi sumber ancaman terhadap independensi

Jika seluruh temuan tersebut dibaca secara terpadu, terdapat suatu pola penting dalam pengalaman auditor FR dan RA. Auditor membutuhkan relasi dengan auditee untuk memperoleh informasi, melakukan klarifikasi, memahami proses bisnis, dan mendorong tindak lanjut atas temuan. Namun, auditor juga harus menjaga jarak profesional agar hubungan tersebut tidak mengubah pertimbangan audit. Dengan demikian, relasi auditor–auditee dalam konteks risiko fraud memiliki sifat paradoksal: semakin baik komunikasi yang dibangun, semakin besar kemungkinan auditor memperoleh informasi yang sebelumnya tidak terlihat; tetapi semakin tidak terkendali kedekatan tersebut, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga independensi dan persepsi independensi.

Pengalaman FR mengenai auditee yang defensif menunjukkan sisi pertama dari paradoks tersebut. Ketika auditee merasa disalahkan, mereka dapat menolak saran auditor dan tidak bersedia mendengarkan arahan untuk melakukan perbaikan. Auditor kemudian perlu mencari pendekatan komunikasi yang sesuai agar pembahasan temuan tetap dapat berlangsung. Pernyataan FR bahwa auditor perlu memahami karakter auditee menunjukkan bahwa kompetensi interpersonal berfungsi sebagai instrumen untuk membuka akses informasi. Dalam konteks fraud, hal ini penting karena informasi mengenai penyimpangan tidak selalu tersedia secara eksplisit dalam dokumen; sebagian informasi dapat diperoleh melalui pertanyaan, klarifikasi, observasi, dan interaksi dengan pihak yang memahami proses transaksi.

Sementara itu, pengalaman RA mengenai understatement utang dan kolusi pegawai dengan vendor memperlihatkan sisi teknis dari tantangan tersebut. Ketika fraud dilakukan melalui penghilangan kewajiban atau hubungan tersembunyi dengan vendor, auditor tidak dapat hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan auditee. Auditor perlu memiliki skeptisisme untuk mencari bukti yang mungkin tidak secara sukarela disampaikan. Di sinilah relasi yang baik perlu dibedakan dari hubungan yang terlalu percaya. Kepercayaan dapat membantu komunikasi, tetapi kepercayaan tidak boleh menggantikan bukti audit.

Prinsip tersebut juga menjelaskan mengapa pernyataan FR mengenai dokumen yang baru dibuat sebelum audit memiliki arti penting. Jika kelengkapan dokumen baru disusun menjelang pemeriksaan, keberadaan dokumen tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa prosedur telah dilaksanakan pada saat transaksi terjadi. Auditor perlu mempertanyakan timing dan sumber bukti, bukan hanya keberadaan bukti. Dalam konteks ini, relasi yang terbuka

dapat membantu auditor memperoleh penjelasan mengenai mengapa dokumen terlambat dibuat, tetapi penjelasan tersebut tetap harus diuji dengan bukti lain.

Pengalaman auditor dalam penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi fraud membutuhkan kombinasi antara skeptisisme profesional, prosedur audit, verifikasi fisik, pemahaman proses bisnis, kemampuan komunikasi, dan batas independensi yang jelas. Safae (2026) menempatkan bad faith auditee sebagai salah satu konteks yang dapat menghasilkan pemalsuan laporan dan dokumen pendukung; sementara temuan lapangan dari FR dan RA menunjukkan bagaimana risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk yang lebih konkret, seperti dokumen yang tidak resmi, ketidaksesuaian fisik dengan catatan, dokumen yang dibuat setelah transaksi, utang yang tidak dilaporkan, vendor fiktif, kickbacks, hingga penyalahgunaan pembayaran. Oleh karena itu, auditor perlu memandang setiap bukti dalam konteks keseluruhan siklus transaksi, bukan secara terisolasi.

Relasi auditor–auditee dalam pengalaman auditor di Makassar pada akhirnya memperlihatkan bahwa kualitas relasi bukan ditentukan oleh seberapa dekat auditor dengan auditee, melainkan oleh kemampuan mempertahankan komunikasi yang terbuka tanpa kehilangan jarak profesional. Auditor perlu cukup dekat untuk memahami proses dan memperoleh informasi, tetapi cukup independen untuk tetap mempertanyakan informasi tersebut. Auditor juga dapat membantu auditee memperbaiki kesalahan, tetapi bantuan tersebut tidak boleh berubah menjadi penghilangan temuan. Relasi yang efektif, dengan demikian, bukanlah relasi yang membuat auditee selalu nyaman terhadap auditor, melainkan relasi yang memungkinkan temuan yang sensitif tetap dapat dibicarakan, diverifikasi, dan ditindaklanjuti tanpa mengorbankan integritas proses audit.

Temuan ini memberikan pemahaman bahwa risiko fraud dalam siklus akuisisi dan pembayaran tidak hanya merupakan persoalan kelemahan pengendalian internal atau manipulasi transaksi, tetapi juga berkaitan dengan dinamika manusia di balik proses tersebut. Auditor berhadapan dengan individu yang memiliki kepentingan, karakter komunikasi, posisi hierarkis, serta respons yang berbeda terhadap pemeriksaan. Karena itu, kemampuan auditor dalam mengelola relasi menjadi bagian penting dari praktik audit, tetapi kemampuan tersebut harus ditempatkan di bawah prinsip objektivitas dan independensi. Dalam kerangka tersebut, relasi menjadi alat untuk memperoleh assurance, bukan alasan untuk mengurangi assurance.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor dalam menghadapi risiko fraud pada siklus akuisisi-pembayaran tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur audit, tetapi juga pada kemampuan auditor memahami keseluruhan proses transaksi, menilai keandalan bukti, serta mempertahankan skeptisisme profesional. Risiko fraud dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti dokumen yang tidak memadai atau dibuat setelah transaksi, ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi fisik, understatement utang, hingga kolusi dengan vendor dan penyalahgunaan pembayaran. Karena itu, auditor perlu mengombinasikan pemeriksaan dokumen, vouching, verifikasi fisik, pemahaman proses bisnis, dan penelusuran terhadap informasi yang tidak secara langsung disampaikan oleh auditee.

Relasi auditor-auditee ditemukan memiliki peran yang bersifat paradoksal. Komunikasi yang terbuka dan kemampuan membangun hubungan profesional dapat membantu auditor memperoleh informasi, melakukan klarifikasi, dan mendorong tindak lanjut atas temuan. Namun, kedekatan yang berlebihan, tekanan, konflik kepentingan, atau ketergantungan terhadap hubungan bisnis dapat mengancam independensi dan skeptisisme auditor. Oleh karena itu, relasi yang efektif bukan berarti menghilangkan konflik, melainkan memungkinkan temuan sensitif tetap dikomunikasikan dan ditindaklanjuti tanpa mengorbankan objektivitas. Penelitian berikutnya disarankan memperluas jumlah dan karakteristik informan, melibatkan auditor dari lebih banyak KAP atau konteks organisasi, serta mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana faktor budaya, struktur kekuasaan, dan tekanan hubungan bisnis memengaruhi independensi auditor dalam menghadapi risiko fraud.

REFERENSI

Arens A. Alvin,. (2015). Auditing dan jasa assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid 2. (Edisi 15). Jakarta. Erlangga.

Arens A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2015). Auditing dan jasa assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid 1. Edisi Lima Belas-Jakarta. Erlangga.

Dunakhir, S., Afiah, N. A., Idris, H., & Idrus, M. (2023). *Understanding auditor-auditee relationship: some cultural considerations. International Journal of Professional Business Review*, *8*(5), 01-30.

Ed-Douadi, S. A. (2026). *The behavioral and cultural determinants of the auditor-auditee relationship: An analysis applied to the auditing of social programs. International Journal of Professional Business Review*, 11(1), 1–25, Article e05811.

Fransiska, E. (2015). Pendeteksian kecurangan pengadaan aktiva tetap dengan metode deduktif pada siklus pembelian dan pembayaran pada PT. Pos Indonesia (Persero) [Skripsi sarjana, Universitas Advent Indonesia]. Perpustakaan UNAI.

Grabosky, P., & Duffield, G. (2001). *Red flags of fraud. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice,* (200), 1–6. *Australian Institute of Criminology*.

Juliyanti, K., & Muslim, A. I. (2024). Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisme, Intuisi, Risiko Audit dan Keahlian Forensik terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 10(2).

Katan, F., & Ratih, S. (2023). Analisis sistem pengendalian internal pembelian untuk meminimalisir risiko kecurangan (Studi pada salah satu manufaktur kelapa di Surabaya). *Journal of Innovation Research and Knowledge,* 3(4), 813–822.

Kaplan, R. L. (2004). *The mother of all conflicts: Auditors and their clients. The Journal of Corporation Law*, 29(2), 363–383.

Kim, B., Kim, C., & Kim, M. (2025). *Regulatory enforcement and audit market consequences: Evidence from KPMG's inspection scandal. The British Accounting Review, Advance online publication.*

Mahendra, A. R., Rahman, M. I. A., &

Sandari, T. E. (2026). Pengaruh Kepatuhan Kode Etik Auditor Terhadap Efektivitas Proses Audit. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 3(1), 94-99.

Miradji, M. A., Vercelly, W. A. S., Putra, R. P. L., & Widyastuti, E. T. (2025). ETIKA DI TITIK KRITIS: STUDI LITERATUR DILEMA ETIS AUDITOR DAN MEKANISME PENJAGAANNYA. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(2), 81-93.

Parinding, I. I., Hasanuddin, A. N. T., Rusdiansyah, N., & Supriyono, R. A. (2025). Analisis Deskriptif Pelaksanaan dan Kendala Audit Internal Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(3), 102-112.

Putri, R. D., Sukraini, J., Syahrila, A. P., & Daryanti, I. (2026). Audit Siklus Akuisisi Modal dan Pembayaran Kembali: Tinjauan Literatur terhadap Prosedur Audit, Risiko Salah Saji, dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 3(01).

Purwanti, L., Triyuwono, I., Ichsan, M., Ramadhani, F. N., Effendie, S. A., & Prakoso, A. (2025). Audit quality: A strategic lesson from the pandemic era. Corporate & Business Strategy Review, 6(2), 8–18.

Rizal, I. (2025). Kolaborasi antara Auditor dan Auditee dalam Proses Pelaksanaan Audit. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(1), 477-488.

Tumanan, M., Akil, A., & Alfarisi, M. N. (2025). Analisis Kasus Siklus Akuisisi dan Pembayaran dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11(04), 232-247.

Taufikurahman, T., Zalzabilah, N., & Masyhuri, M. (2025). Optimalisasi audit internal terhadap siklus pendapatan dan pengeluaran sebagai pencegahan kecurangan di era digital. Journal of Economics, Management, and Accounting, 1(2), 337-346.

Wahyudi, G., & Qintharah, Y. N. (2023). Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Risiko Audit, Dan Keahlian Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 8(1), 96-114.

Wati, R. S. (2026). *Fraud and the accounting information system.* Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 3(6), 33–52.